BAB I
PENDAHULUAN

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja SKPD berpedoman kepada Rencana Strategi SKPD yang juga mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Rencana Kerja disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja SKPD ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang juga digunakan sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat program dan kegiatan SKPD pada tahun berjalan. Penyusunan Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja tersebut juga mengacu dan mendukung dalam penyelesaian permasalahan isu isu strategis yang berkembang.

Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kediri memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas

pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kediri 2021 – 2026 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani".

1.2. LANDASAN HUKUM RENJA 2024

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja 2024 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATPOL PP KABUPATEN KEDIRI

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri ini adalah untuk acuan dan bahan pertimbangan SKPD bagi penentu kebijakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri pada Tahun 2024;
2. Program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementrian/Lembaga dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

Bab III Tujuan dan Sasaran SKPD

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

Bab V Penutup

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (tahun 2023), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Kediri Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri s.d. tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

TABEL. 2.1.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN KEDIRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100

1	05	01				***Program penunjang urusan pemerintah daerah***	Persentase indikator program yang tercapai	100 %	100 %	***100%***	***100%***	100%	100 %	300%	
01	02	01				**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	6 dok	5 dok	8 dok	8 dok	100%	7 dok	20 dok	
	02	01	01			Penyusunan dok perencanaan perangkat daerah	Jumlah dok perencanaan perangkat daerah	3 dok	-	5 dok	5 dok	100%	3 dok	8 dok	
01	02	01	02			Koordinasi dan penyusunan dok RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	
01	02	01	03			Koordinasi dan penyusunan dok perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	
01	02	01	07			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	2 dok	5 dok	
01	**02**	**02**				**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan**	**12 bln**	**12 lap**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**12 bln**	**36 lap**	
01	02	02	01			Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	24 lap	24 lap	24 lap	24 lap	100%	24 lap	72 lap	
01	02	02	02			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	
01	02	02	05			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	
01	**02**	**03**				**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**12 lap**	**12 lap**	**12 lap**	**12 lap**	**100%**	**12 lap**	**36 lap**	

01	02	03	06			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	
01	**02**	**05**				**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	**1 dok**	**12 lap**	**1 dok**	**12 dok**	**100%**	**12 dok**	**36 dok**	
01	02	05	02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaaan pakaian dinas	214 stel	214 stel	214 stel	245 stel	114%	214 stel	673 stel	
01	**02**	**06**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**12 lap**	**12 lap**	**12 lap**	**12 lap**	**100%**	**12 lap**	**36 lap**	
01	02	06	02			Penyediaan Peralaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	
01	02	06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	4 kl	4 kl	4 kl	4 kl	100%	4 kl	12 kl	
01	02	06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	
01	**02**	**07**				**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 unit**	**8 unit**	
01	02	07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	-	8 unit	8 unit	
01	**02**	**08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 lap**	**12 lap**	**12 lap**	**12 lap**	**100%**	**12 lap**	**36 lap**	
01	02	08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	
01	02	08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lap	12 lap	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 lap	

01	**02**	**09**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara**	**12 lap**	**12 lap**	**12 lap**	**12 lap**	**100%**	**12 lap**	**36 lap**	
01	02	09	01			Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	
01	02	09	02			Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	
01	02	09	08			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	-	30 unit	20 unit	66,67%	30 unit	50 unit	
1	**05**	**02**				***Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**1. Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100 %**	**100 %**	***100%***	***100%***	**100%**	**100 %**	**300 %**	
							2. Ratio Satlinmas yang sudah terlatih			*100%*	*100%*	100%	100 %	300 %	
							3. Ratio Anggota Pol PP per 10.000 penduduk			*1 : 0,6*	*1 : 0,3*	100%	***1 : 0,3***	1 : 0,3	
1	05	02	2			**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	300 %	
% 1	05	02	2	0 1	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, melaksanakan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kegiatan patroli wilayah	96 keg	0	96 keg	96 keg	100%	96 keg	192 keg	

1	05	02	2	01	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kegiatan penyidikan pelanggaran perda	48 kali	0	48 kali	11 kali	22,90%	48 kali	59 kali	
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	1050 org	153 orang	0	0	0	2553 org	2706 org	
1	05	02	2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yg bernuansa hak asasi manusia	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	3 keg	1 keg	3 keg	1 keg	33,3%	3 keg	5 keg	
1	05	02	2	01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan pengamanan wilayah	108 keg	136 keg	108 keg	25 keg	23,15%	90 keg	251 keg	63 keg
1	05	02	2	01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	10 org	0	0	0	0	10 org	10 org	3 org
1	05	02	2	02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	Jumlah kegiatan penegakan perda	288 keg	40 keg	288 keg	288 keg	100%	288 keg	616 keg	154 keg
1	05	02	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Praturan Bupati/Walikota	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan	16 keg	0	0	0	0	10 keg	10 keg	3 keg
1	05	02	2	02	03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan operasi penertiban	288 keg	40 keg	288 keg	288 keg	100%	288 keg	616 keg	154 keg

1	05	02	2	03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Jumlah penambahan calon personil PPNS	5 org	0	**0**	**0**	0	1 org	1 org	1 org
1	05	02	2	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah pengiriman Calon PPNS	5 org	0	0	0	0	1 org	1 org	1 org
1	05	04				***Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran***	Prosentase kejadian kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit	86,62%	50%	59,02%	30 %	50%	59.02%	139,02 %	161 %
1	05	04	2	01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300 %	75 %
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pemadaman dan pengendalian bahaya kebakaran	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	9 bln
1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah penyelamatan dan evakuasi	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	9 bln
1	05	04	2	01	06	Pengadaan sarana prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia	0 set	0	0	0	100%	208 buah	208 buah	52 buah
1	05	04	2	04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah kegiatan sosialisasi	24 keg	1 keg	0	0	0	8 keg	9 keg	3 keg
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegajan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi MasyarakatKebakaran	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	24 keg	1 keg	**0**	**0**	0	8 keg	9 keg	3 keg

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 3 (tiga) Program pada Renja Tahun 2022 yaitu meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 15 sub kegiatan.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Adapun rincian realisasi anggaran pada Tahun 2022 pada 3 program yang secara anggaran semuanya berada di bawah target yang ditentukan yaitu untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan 100 % namun terealisasi sebesar 94,26%. Untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ditargetkan sebesar 100 % terealisasi sebesar 54,43%. Sedangkan untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 97,25%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus dikaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM yang baru, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu adanya penyesuaian dalam penetapan Indikator Kinerja dan Target. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SATPOL PP Kabupaten Kediri disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Satpol PP 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Tahunan Satpol PP berdasarkan SPM terbaru tetapi masih mengacu target pada renstra yang belum mengalami perubahan.

Adapun tabel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEDIRI

SKPD : SATPOL KABUPATEN KEDIRI

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dengan tindakan preventif diharapkan tidak ada penegakan perda yg berakibat terhadap masyarakat (berdasarkan SPM Baru)
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Masih kurang idealnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kediri sesuai Standar Pelayanan Minimal.
2. Kurang tertibnya administrasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
3. Kurangnya Sarana Prasarana terutama untuk penunjang Pemadam Kebakaran dan rescue.
4. Kurangnya jumlah tenaga pemadam kebakaran untuk melayani jangkauan wilayah Kabupaten Kediri yang luas serta kurangnya tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terlatih.
5. Kurangnya fasilitas umum dan industri yang menyediakan sarana proteksi kebakaran.
6. Kurangnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanganan kebakaran di masyarakat
7. Pemberdayaan masyarakat serta partispasinya yang masih rendah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Permasalahan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun selalu ada akan tetapi mengalami penurunan dari segi kualitas dan kuantitas. Satpol PP perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dilakukan analisis terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik serta berupaya meningkatkan kinerja dalam memenuhi target yang sudah ditetapkan. Berbagai upaya yang bias dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, antara lain :

1. Penambahan sarana dan prasarana baik Satpol PP maupun Sub Pemadam Kebakaran (Pos Pemadam Kebakaran, Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Evakuasi).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, baik Satpol PP maupun Pemadam Kebakaran/Penyelamatan dengan mengikutkan pendidikan

dan pelatihan.

3. Penambahan personel baik PNS maupun PPPK agar sebanding dengan wilayah Kabupaten Kediri yang sangat luas.
4. Koordinasi dengan instansi terkait guna optimalisasi dana desa untuk mitigasi bencana di masing masing desa yang dapat digunakan untuk pelatihan dan sosialisasi kebakaran serta membentuk relawan kebakaran guna membantu petugas pemadam kebakaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5. Menjalin kerjasama yang aktif dengan instansi terkait maupun swasta di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Kebakaran/Rescue.
6. Menghimbau kepada pengelola fasilitas umum dan industri untuk menyediakan sarana proteksi kebakaran.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan mengacu pelaksanaan tugas pokok fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu Tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kediri, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

RENCANA KERJA 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2024

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KEDIRI

SKPD : SATPOL PP KABUPATEN KEDIRI

NO	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan		LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2		3	4	5		6	7		8	9	10	11	12
	Program	*Program penunjang urusan pemerintah daerah*	Kab Kediri	Persentase Indikator Program yang tercapai		100 %	8.974.112.455	Program	*Program penunjang urusan pemerintah daerah*	Kab Kediri	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	9.073.270.400	
	Kegiatan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	3.400.000	Kegiatan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	3.400.000	
	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	800.000	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	600.000	
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab Kediri	Jumleh Dokumen RKA		1	700.000		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	9	Jumleh Dokumen RKA	1	700.000.	

		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Perubahan RKA		1	700.000		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1		700.000			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab Kediri	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1	700.000		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab Kediri	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1	700.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD		1	700.000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD		1	700.000			
	Kegiatan	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab Kediri	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		1	8.612.782.455	Kegiatan	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12		8.612.782.500			
	Sub Kegiatan	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Kab Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		88	8.474.112.455	Sub Kegiatan	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Kab Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88		8.474.112.500			
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab Kediri	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan ASN		12	137.760.000		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab Kediri	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan ASN	12		137.760.000			

		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab Kediri	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	910.000.000		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab Kediri	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		910.000			
	Kegiatan	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		0	0	Kegiatan	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0		0			
	Sub Kegiatan	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab Kediri	Jumlah Laporan	0		0	Sub Kegiatan	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab Kediri	Jumlah Laporan	0		0			
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1		116.523.000		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	0		0			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Kediri	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas			0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Kediri	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0		0			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		12	**226.704.800**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12		**275.823.300**			
		Penyediaan Peralaan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kediri	Jumlah Paket Pengadaan		12	31.745.200		Penyediaan Peralaan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kediri	Jumlah Paket Pengadaan	12		31.746.200			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		22.119.600			

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kediri	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		2.669.1000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kediri	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		23.544.600			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		12	27.268.600		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kediri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12		27.268.600			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0		0			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kiunjungan Tamu		0	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kiunjungan Tamu	12		6.095.000			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kediri	Jumlah Laporan		12	165.020.900		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kediri	Jumlah Laporan	12		165.049.300			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		0			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1		**2.605.200**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab Kediri	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1		5.644.600			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Kab Kediri	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Kab Kediri	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		0			

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kediri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			-		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kediri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	91		5.644.600			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	**8.720.000**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12		**8.720.000**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kediri	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	8.720.000		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kediri	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		8.720.000			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Aset Tetap yang terpelihara		12	**119.900.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Kediri	Jumlah Laporan Aset Tetap yang terpelihara	12		**166.900.000**			
		Penyediaan jasa Pemeliharaan. biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Kediri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		17	92.900.000		Penyediaan jasa Pemeliharaan. biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Kediri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17		92.900.000			
		Pemeliharaan Mebel	Kab Kediri	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0		Pemeliharaan Mebel	Kab Kediri	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0		0			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab Kediri	Jumlah Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang dipelihara		740	27.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab Kediri	Jumlah Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang dipelihara	740		74.000.000			

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Kediri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Kediri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0		0			
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab Kediri	Prosentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani	100 %		**9.836.822.600**		***Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	Kab Kediri	Prosentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani	100 %		**10.036.822.600**			
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab Kediri	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani		100 %	**6.498.980.400**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	Kab Kediri	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani			**6.498.980.400**			
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Kediri	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	2		300.000.000		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Kediri	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum		2	300.000.200			
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yg bernuansa hak asasi manusia	Kab Kediri	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		245	239.999.800		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yg bernuansa hak asasi manusia	Kab Kediri	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	245		239.999.800			

		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab Kediri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan		48	100.000.000		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab Kediri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan	48		100.000.000			
		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. Pembinaan dan Penyuluhan. melaksanakan patroli. pengamanan dan pengawalan	Kab Kediri	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		117	5.703.980.500		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. Pembinaan dan Penyuluhan. melaksanakan patroli. pengamanan dan pengawalan	Kab Kediri	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	117		5.703.980.500			
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab Kediri	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		36	150.000.000		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab Kediri	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36		150.000.000			

		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10		4.999.900		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10		4.999.900			
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0		0-		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0		0			
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab Kediri	Jumlah kegiatan penegakan perda		288	**3.337.842.200**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	Kab Kediri	Jumlah kegiatan penegakan perda	288		**3.537.842.200**			
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Praturan Bupati/Walikota	Kab Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		16	3.100.000.000		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Praturan Bupati/Walikota	Kab Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16		3.100.000.000			
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Kab Kediri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran		268	132.990.100		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Kab Kediri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran	268		332.990.100			

		Bupati/Walikota		Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					Bupati/Walikota		Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12		104.852.100		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12		104.852.100			
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab Kediri	Jumlah penambahan calon personil PPNS	0		0	Kegiatan	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Kab Kediri	Jumlah penambahan calon personil PPNS	0		0			
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0		0	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		0	0			
		Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab Kediri	Cakupan layanan kasus penanganan bencana kebakaran Prosentase Kejadian Kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit	100% 86,62%		**1.412.056.000**	Program	***Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran***	Kab Kediri	Cakupan layanan kasus penanganan bencana kebakaran Prosentase Kejadian Kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit	100 % 86, 62 %		**1.412.056.000**			

		Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab Kediri	Prosentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		**1.250.056.000**	Kegiatan	Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab Kediri	Prosentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %		**1.250.056.000**			
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12		171.056.000	Sub Kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12		171.056.000			
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12		39.500.000		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12		39.500.000			
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,	12		67.000.000		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	12		67.000.000			

				Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal							Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal						
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab Kediri	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27		972.500.000		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab Kediri	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27		972.500.000			
		Pengadaan sarana prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Kab Kediri	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia		0	0		Pengadaan sarana prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Kab Kediri	Jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia	0		0			
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab Kediri	**Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran**		0	0		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Kab Kediri	**Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran**	0		0			
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Kediri	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi		0	0		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Kediri	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		0	0			

				Kebakaran													
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab Kediri	**Jumlah kegiatan sosialisasi**	12		162.000.000		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Kab Kediri	**Jumlah kegiatan sosialisasi**	12		162.000.000			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegajan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi MasyarakatKebakaran	Kab Kediri	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		600	162.000.000		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegajan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebakaran	Kab Kediri	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	600		162.000.000			
							20.222.991.055							**20.522.149.000**			

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasar pada Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja perencanaan program dan kegiatan tahunan tersebut salah satunya berdasarkan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari usulan pada kegiatan Musrenbang RKPD 2024 sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas *(bottom-up planning)*. Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2024 juga berdasar pada skala prioritas dan mempertimbangkan kondisi saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, untuk program kegiatan pada tahun 2024 belum ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

TEMA PEMBANGUNAN :

"Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

PRIORITAS NASIONAL :

Ada 8 (delapan) arah kebijakan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan ibukota negara (IKN)
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Memperhatikan arah kebijakan nasional tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri pada tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas pembangunan nasional , namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai unsur pelaksana pemerintan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka dukungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan pusat dan provinsi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah :" ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani***"". Untuk mencapai visi tersebut kemudian dijabarkan dalam sembilan turunan misi yang menjadi janji politik saat masa kampanye. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja mengemban Misi 1 yaitu *"Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius"* yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP 2021 - 2026. Maka disusunlah tujuan pembangunan di Satpol PP selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dan target kinerja di tahun 2024 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	Prosentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya responsibilitas penanganan bahaya kebakaran	Cakupan layanan penanganan kasus kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam menunjang kebijakan nasional maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri pada tahun 2024 menentukan program dan kegiatan sekaligus target yang ingin dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Satpol PP. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Satpol PP mencapai kinerja yang lebih baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Kediri 2021 - 2026.

Pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri berdasar pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memetakan nomenklatur dalam 3 program 14 kegiatan dan 43 sub kegiatan di mana penyebaran sasaran lokasi program dan kegiatan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Adapun total anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 20.522.149.000,- (dua puluh milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 beserta pemetaannya disampaikan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KEDIRI

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. KEDIRI

Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	05	01			***Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota***	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	**Kab. Kediri**	100 %	**9.073.270.400**	APBD		100 %	8.465.027.136
	1	05	01	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	**Kab. Kediri**	6 dok	**3.400.000**	APBD		6 dok	**13.350.000**
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri	3 dok	600.000	APBD		3 dok	2.750.000
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kediri	1 dok	700.000	APBD		1 dok	2.650.000

	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kediri	1 dok	700.000	APBD		1 dok	2.650.000
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kediri	1 dok	700.000	APBD			2.650.000
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kediri	1 dok	700.000	APBD			2.650.000
	1	05	01	2.02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Kab. Kediri	12 bln	**8.612.782.500**	APBD		**12 bln**	**7.329.530.715**
	1	05	01	2.02	0001	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri	88 Orang/ bulan	8.474.112.500	APBD		24 lap	7.123.765.215
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri	12 dok	137.760.000	APBD		12 lap	203.565.500
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri	1 lap	910.000	APBD		1 dok	2.200.000
	1	05	01	2.03		**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Kab. Kediri**	12 lap	-	APBD		**12 lap**	**14.699.800**
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kediri	12 lap	0,00	APBD		12 lap	14.699.800

	1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	**Kab. Kediri**	0 dok	**Rp -**	APBD		**1 dok**	**200.000.000**
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kediri	1 Paket	0,00	APBD		214 stel	200.000.000
	1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	**Kab. Kediri**	12 lap	**275.823.300**	APBD		12 lap	**440.247.100**
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri	12 paket	31.746.200	APBD		12 lap	38.021.000
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kediri	12 paket	22.119.600				6.000.000
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri	12 paket	23.544.600				50.000.000
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kediri	12 paket	27.268.600	APBD		4 kl	61.626.100
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kediri	0 dok	0,00				0,00
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kediri	12 lap	6.095.000				5.000.000
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri	12 lap	165.049.300	APBD		12 lap	279.600.000
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kediri	12 dok	0,00	APBD			0,00
	1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana**	**Kab. Kediri**	1 unit	**5.644.600**	-	-	-	208.999.900

	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kediri	1 unit	0,00	-	-	-	144.000.000
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kediri	91 unit	**5.644.600**	-	-	-	64.999.900
	1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Kediri**	12 lap	**8.720.000**	APBD		12 lap	**18.199.730**
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kediri	12 lap	8.720.000	APBD		12 bln	18.199.730
	1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	**Kab. Kediri**	12 lap	**166.900.000**	APBD		**12 lap**	**239.999.891**
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kab. Kediri	17 unit	92.900.000	APBD		12 lap	175.000.000
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Kediri	294 unit	0,00	APBD		12 lap	5.000.000
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kediri	740 unit	74.000.000	APBD		30 unit	45.000.000
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kediri	0 unit	0,00	APBD		30 unit	14.999.891
2	1	05	02			***Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	**Kab. Kediri**	100 %	**10.036.822.600**	APBD		**100%**	**10.488.180.700**

							2. Ratio Satlinmas yang sudah terlatih	Kab. Kediri			APBD			
							3. Ratio Anggota Pol PP per 10.000 penduduk	Kab. Kediri			APBD			
							4. Prosentase PPNS dibandingkan dengan Jumlah Perda/Perkada	Kab. Kediri			APBD			
	1	05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	**Kab. Kediri**	100 %	**6.498.980.400**	APBD		**100%**	**6.796.282.000**
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kediri	2 Dok	300.000.200	APBD		1050 org	300.000.000
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yg bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kediri	245 Orang	239.999.800	APBD		3 keg	240.000
	1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Kediri	48 Dok	100.000.000	APBD		108 keg	496.821.400

	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Barang	-	-	-	-	-	-	-
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Kediri	117 Lap	5.703.980.500				5.484.307.200
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Kediri	36 Lap	150.000.000				285.059.900
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar kepada warga Layanan yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Kediri	10 Lap	4.999.900	APBD		10 org	4.999.900
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemiliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Kediri	0 Unit	0,00				224.853.600

	1	05	02	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah	**Kab. Kediri**	288 Keg	**3.537.842.200**	APBD		**288 keg**	**3.641.898.700**
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Kediri	16 Lap	3.100.000.000	**APBD**		16 Keg	3.100.000.000
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah sesuai SOP	Kab. Kediri	268 Lap	332.990.100	APBD		288 keg	335.898.700
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Kediri	12 Lap	104.852.100				206.000.000
	1	05	02	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Penambahan Calon Personil PPNS	**Kab. Kediri**	0 org	-	-	-	-	50.000.000
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Kediri	0 Lap	0,00	-	-	-	50.000.000
3	1	05	04			**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	Cakup layanan kasus penanganan bencana kebakaran Prosentase Kejadian Kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit	Kab. Kediri	100% 86,62%	1.412.056.000				3.237.432.500

	1	05	04	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	**Kab. Kediri**	100%	**1.250.056.000**	APBD		**100%**	**3.050.432.500**
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	12 Lap	171.056.000	APBD		12 bln	351.500.000
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Kediri	12 Dok	39.500.000	APBD		12 bln	101.500.000
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kab. Kediri	12 Dok	67.000.000	APBD		12 bln	189.717.500
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Kediri	27 Orang	972.500.000	APBD		12 bln	1.642.640.000
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan sarana prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Jumlah Sarana Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan	Kab. Kediri	30 Unit	0,00	APBD		-	765.075.000

							Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait							
	1	05	04	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran**	Kab. Kediri	144 kali	-	APBD		**144 kl**	**25.000.000**
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kab. Kediri	12 Dok	0,00	APBD		144 kl	25.000.000
	1	05	04	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah kegiatan sosialisasi**	Kab. Kediri	12 keg	162.000.000			**24 keg**	**162.000.000**
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Kediri	600 Orang	162.000.000	APBD		24 keg	162.000.000
										20.522.149.000				**22.190.640.336**

Dalam Renja 2024 yang disusun mengacu pada Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah di tetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri melaksanakan monitoring dan pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan perbaikan yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD.

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri, guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang merupakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Kediri yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang profesional, dan berdasar pada Permendagri No 90 Tahun 2019 dilaksanakan pada 3 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Guna menunjang kebijakan tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 yang memuat 3 Program, 14 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Adapun untuk tahun 2024 akan disajikan data program kegiatan serta pemetaan program kegiatan adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp)
1	***Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**9.073.270.400**
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**	**3.400.000**
	Penyusunan dok perencanaan perangkat daerah	Jumlah dok perencanaan perangkat daerah	600.000
	Koordinasi dan penyusunan dok RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000
	Koordinasi dan penyusunan dok perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	700.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	700.000
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan**	**8.612.782.500**
	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.474.112.500
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.760.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	910.000

	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	-
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Rp -
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**275.823.300**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31.746.200
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan dan Rumah Tangga yang Disediakan	22.119.600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23.544.600
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27.268.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.095.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.049.300
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana**	**5.644.600**

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.644.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**8.720.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.720.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara***	**166.900.000**
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	92.900.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	74.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	***1. Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani***	**10.036.822.600**
		2. Ratio Satlinmas yang sudah terlatih	-
		3. Ratio Anggota Pol PP per 10.000 penduduk	-
		4. Prosentase PPNS dibandingkan dengan Jumlah Perda/Perkada	-

	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani**	**6.498.980.400**
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	300.000.200
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja san Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yg bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	239.999.800
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100.000.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Barang	-
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP	-
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, melaksanakan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	5.703.980.500
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	150.000.000
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar kepada warga Layanan yang Terdampak Penegakan Perda dan	4.999.900

		Perkada yang Terlayani	
	Pengadaan dan Pemiliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	**Jumlah kegiatan penegakan perda**	**3.537.842.200**
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.100.000.000
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah sesuai SOP	332.990.100
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	104.852.100
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah penambahan calon personil PPNS**	**-**
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakup layanan kasus penanganan bencana kebakaran Prosentase Kejadian Kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit	**1.412.056.000**
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**1.250.056.000**

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	171.056.000
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	39.500.000
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	67.000.000
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	972.500.000
	Pengadaan sarana prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Jumlah Sarana Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0,00
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran**	-
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah kegiatan sosialisasi**	**162.000.000**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	162.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan program kegiatan tahun 2024. Di mana dalam Rencana Kerja tersebut diuraikan target Satpol Pamong Praja di tahun 2024 serta besaran anggaran yang mendukung program dan kegiatan dalam mencapai target tersebut serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan di Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024.

Dengan memaksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai adalah merupakan faktor penting dalam menunjang pencapaian target pada Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Satuan Polisi Pamong Praja mencapai kinerja yang maksimal sehingga dapat menjawab tantangan seperti diamanatkan RPJMD Kabupaten Kediri 2021 - 2026.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan perencanaan program dan kegiatan tahunan SKPD yang mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kediri.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2 Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berdoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Kediri, 28 - 7 - 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kediri

PEMERINTAH KEDIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

AGOENG NOEGROHO
Pembina Tk. I
NIP. 19671225 199503 1 004

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA